BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada setiap daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1, "Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Undang-Undang ini memberikan pengaruh yang begitu besar terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Melalui Undang-Undang ini secara tegas daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi rakyat.

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kehidupan berdemokrasi serta mendorong pemberdayaan sehingga dapat meningkatkan kreativitas masyarakat. Dengan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan secara maksimal, sehingga memicu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menunjukan bagaimana suatu

daerah otonom menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijaksana dan sesuai dengan yang diharapkan.

Halim (2007) menjelaskan bahwa suatu daerah yang melaksanakan otonomi daerah harus mampu memaksimalkan potensi daerahnya, baik potensi sumber daya alam, manusia, maupun keuangannya. Sebagaimana telah diatur dalam PP nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 3, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu perwujudan yang sangat nyata dari kemandirian suatu daerah. Jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar maka peranan pemerintah daerah akan menjadi lebih besar (Samora, 2010). Melalui otonomi daerah pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengelola keuangan, terutama dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD menuntut setiap pemerintah daerah agar mampu merealisasikan anggaran yang telah dirancang dan disahkan. Kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan anggaran dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai kinerja keuangan (Mahsun, 2012).

Kinerja keuangan memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, target, visi dan misi pemerintah daerah. Sementara kemampuan keuangan daerah menunjukkan seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri untuk membiayai kebutuhannya tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Tingkat pencapaian ini diukur melalui indikator-indikator keuangan yang dapat dinilai dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Mahsun, 2012).

Analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan direalisasikan merupakan salah satu cara untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah (Mardiasmo, 2009). Analisis rasio tersebut dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai pada satu periode dengan hasil yang diperoleh pada periode sebelumnya, sehingga dapat dilihat kecenderungan yang terjadi. Analisis juga dapat dilakukan dengan membandingkan hasil yang diperoleh pada satu periode dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui analisis rasio keuangan daerah ini dapat diketahui bagaimana kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan. Selain itu analisis rasio keuangan juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah selanjutnya (BPKAD Banjar, 2017).

Menurut Mardiasmo (2009) penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat untuk menganalisis kinerja keuangan secara umum telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial. Sementara pada lembaga publik

khususnya pemerintah daerah kabupaten penggunaannya masih sangat terbatas, sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang pasti mengenai nama dan kaidah pengukurannya (Mardiasmo, 2009). Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilakukan.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah otonom di Indonesia. Berdasarkan data statistik, Provinsi Sumatera Barat memiliki 19 kabupaten/kota yang terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Mariani (2013) tentang kinerja keuangan daerah menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola keuangannya tergolong efisien, meskipun mengalami punurunan setelah terjadi pemekaran daerah. Sementara itu, tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukan hasil yang positif terlihat dari rasio kemandirian yang semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah semakin meningkat (Mariani, 2013).

Penelitian yang serupa juga pernah dilakukan sebelumnya oleh Intan (2018) yang melakukan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2012-2016. Kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat telah pernah diukur sebelumnya pada penelitian tersebut,namun peneliti tidak melakukan analisis terhadap rasio keuangan masing-masing daerah yang telah diukurnya. Dalam penelitian tersebut

peneliti hanya terfokus pada perbandingan kinerja keuangan antar kabupaten/kota saja. Pada penelitian ini penulis akan fokus melakukan analisis kinerja keuangan pada salah satu pemerintah daerah saja, yaitu pemerintah Kabupaten Pasaman.

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Republik Indonesia, pada tahun 2021 Kabupaten Pasaman telah resmi ditetapkan sebagai kabupaten yang berhasil meningkatkan status daerah dari berkembang menjadi maju. Penetapan ini dilakukan berdasarkan pada klasifikasi Indeks Desa Membangun (IDM). Pencapaian ini tidak terlepas dari upaya pemerintah darah dan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan daerahnya.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja dan kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Pasaman. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data yang telah diolah terkait dengan kinerja keuangan pemerintah. Analisis ini dilakukan dengan cara menhitung rasio keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman. Analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman ini akan menghasilkan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah daerah telah berhasil mengelola keuangannya dengan baik.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dengan judul penelitian **"Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman pada tahun 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman pada tahun 2016-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kinerja dan kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Pasaman. penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis telah dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan kinerja dan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Pasaman dalam upaya pengalokasian dan pemerolehan sumber pendapatan daerah sehingga masyarakat mampu menilai dan menyikapi permasalahan daerah secara objektif. Penelitian ini juga diharapkan

dapat dijadikan sebagai informasi tambahan, bahan perbandingan, dan acuan dalam upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Pasaman.

1.5 Batasan atau Ruang Lingkup

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka diperlukan pembatasan masalah untuk menghindari berbagai kesalahan persepsi yang terkaitan dengan penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini dibatasi pada analisis kinerja keuangan daerah yang dilihat dari rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas serta pemetaan kemampuan keuangan pemerintah. Analisis ini dilakukan pada pemerintah daerah Kabupaten Pasaman pada tahun anggaran 2016-2020 sekaligus membandingkannya dengan kinerja keuangan rata-rata pemerintah daerah kabupaten se-Provinsi Sumatera Barat.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penulisan suatu penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi kedalam lima bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian-uraian latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika

penulisan. Pada bab ini penulis menjelaskan mengapa perlunya dilakukan penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah khususnya Kabupaten Pasaman.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Bab ini terdiri dari penjelasan teori dan konsep yang mendukung penelitian dan akan digunakan sebagai dasar pembahasan penelitian ini. Pada bab ini Peneliti juga membahas mengenai beberapa penelitian terkait yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas dan menjelaskan tentang desain penelitian, objek penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil pengolahan data dan penghitungan rasio-rasio keuangan pemerintah kabupaten disertai dengan pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisi yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, serta saran.